Indonesian Journal of Educational Management and Leadership
Volume 01, Issue 01, 2023, pp. 45-56
https://doi.org/10.51214/ijemal.v1i1.485
Journal homepage: https://journal.kurasinstitute.com/index.php/jemal

Urgensi pelaksanaan pendidikan karakter yang terintegrasi: analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter

Sahlah Hafidzudin Fikri[1*], Wahyu Raman Warnerin Rangga Panji[2], Eka Laila Fitriyah[3]
[1] Universitas Islam Negeri Raden Intan, Indonesia
[2] SD Negeri 1 Qurnia Mataram, Indonesia
[3] SD Negeri 1 Trimulyo, Indonesia
*Correspondence: Sahlanhafidzudin07@gmail.com

Article history:
Received
January 4, 2023

Reviewed
January 15, 2023

Accepted
January 21, 2023

ABSTRACT
Purpose – *Character education is a serious concern for the Indonesian government. this can be seen in the government's efforts to overshadow the implementation of character education with Presidential Regulation No. 87 of 2017 concerning strengthening character education. This study aims to analyze educational policies regarding strengthening character education (PPK).*
Method – *The research method used in this research is policy research with a literature review approach. Presidential Regulation No. 87 of 2017 is the primary source in this research, while secondary sources come from books and scientific journals.*
Findings – *The results of the study show that 1) Strengthening character education is carried out in the family, school and community environment, 2) policies for strengthening character education tend to only regulate the implementation of character education in formal education, 3) strengthening character education that is integrated between education in the family, school and community environments. In addition, it must also consider 4 components that are the main focus in the success of this PPK program, namely, body, mind, heart and feeling.*
***Keywords**. strengthening character education, policy analysis, integration of character education*

Histori Artikel:
Diterima
4 Januari 2023

Ditinjau
15 Januari 2023

Disetujui
21 Januari 2023

ABSTRAK
Tujuan – Pendidikan karakter menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. hal tersebut tampak pada usaha pemerintah untuk menaungi pelaksanaan Pendidikan karakter dengan peraturan perpres no 87 tahun 2017 tentang penguatan Pendidikan karakter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pendidikan tentang penguatan pendidikan karakter.
Metode – Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian kebijakan dengan pendekatan kajian pustaka. Peraturan presiden no 87 tahun 2017 menjadi sumber primer dalam penelitian ini, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku dan jurnal ilmiah..
Hasil – Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, 2) kebijakan penguatan pendidikan karakter cenderung hanya mengatur pelaksanaan Pendidikan karakter di Pendidikan formal, 3) penguatan Pendidikan karakter yang terintegrasi antara pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Selain itu juga harus mempertimbangkan 4 komponen yang

menjadi fokus utama dalam keberhasilan program PPK ini yaitu, raga, pikir, hati dan rasa

Keywords: penguatan pendidikan karakter, analisis kebijakan, integrasi pendidikan karakter

Pendahuluan

Pendidikan karakter merupakan harapan negara bagi bangsa dimana pendidikan karakter akan melahirkan peserta didik yang banyak dinantikan, dimana peserta didik tersebut dapat menyeimbangkan sikap kognitif, afektif, dan psikomotoriknya sehingga nantinya ketika peserta didik tersebut dewasa dapat bersaing (Suriadi et al., 2021). Pendidikan karakter merupakan hal yang perlu dilaksanakan karena Pada dasarnya semua guru sebagai pendidik memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk karakter masyarakat (Wayan et al., 2020).

Indonesia sebagai negara yang berbudaya, merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti. Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, maka diperlukan penguatan pendidikan karakter (Presiden, 2017). Salah satu upaya yang dapat dilakukan secara sistematis untuk melaksanakan Pendidikan karakter ini yaitu dengan membuat kebijakan tentang Pendidikan karakter, maka lahirlah perpres no 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Dalam perpres tersebut juga, tanggunga jawab penguatan pendidikan karakter adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, satuan pendidikann dan masysarakat. Penyelenggaraan pendidikan karakter (PPK) merupakan gerakan yang dapat meningkatkan karakter setiap individu agar memiliki karakter yang lebih baik, maka komitmen orang tua, sekolah dan masyarakat merupakan gerakan revolusioner nasional untuk masa depan (Atika et al., 2019).

Dunia Pendidikan merupakan cara yang telah dilakukan umat manusia sepanjang kehidupannya untuk menjadi sarana dalam melakukan transmisi dan transformasi baik nilai maupun ilmu pengetahuan. Demikian strategisnya dunia pendidikan sebagai sarana transmisi dan transformasi nilai dan ilmu pengetahuan ini, maka dalam rangka menanamkan dan mengembangkan karakter bangsa ini, tidak lepas pula dari peran yang dimainkan oleh dunia pendidikan. Pendidikan karakter penting bagi kehidupan manusia, maka peran yang dimainkan dunia pendidikan haruslah tidak sekadar menunjukkan pengetahuan moral, tetapi juga mencintai dan mau melakukan tidakan moral (Ajat Sudrajat, 2011).

Penguatan pendidian karakter sendiri merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui

harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan oleh raga dengan melibatkan kerjasama antara satuan pendidikan , keluarga dan masyarakat. Gerakan tersebut meruapak salah satu bagian dari gerakan nasional revolusi mental yang dicanangkan oleh bapak presiden RI, Joko Widodo.

Tujuan dari Penguatan pendidikan karakter (PPK) ini adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa pancasila dan pendidikan karakter yng baik guna menghadapi dinamika perubahan masa depan. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meiiputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangatkebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.

Dalam satuan pendidikan formal PPK terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. PPK pada satuan pendidikan jalur formal dilakaksanakan selama 6 atau 5 hari sekolah dalam satu minggu. Hal ini yang hingga saat iimasih terjadi polemik di masyarakat. Walaupun teknis pelaksanaan 5 hari dan 6 hari sekolah tersebut diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah/madrasah dan dilaporkankepada pemerintah. Bahkan sekolah yang akan melaksanakan penguatan pendidikan karakter dengan mengambbil 5 hari sekolah harus mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya kecukupan tenaga pendidik dan kependidikan, ketersediaan sarana dan prasarana, kearifan lokal, serta pendapat tokoh agama atau masyarakat.

Penelitian-penelitian tentang kebijakan pendidikan karakter telah banyak dilakukan, misalnya Ismail et al., (2020) mengkaji kebijakan penguatan pendidikan karakter untuk mewujudkan Pelajar Pancasila. Setiawan et al., (2021) mengkaji penerapan kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Fanny, (2020) mengkaji tentang pemikiran Ki Hadjar Dewantara terkait pelaksanaan kebijakan PPK. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berusaha menganalisis konten atau isi kebijakan PPK secara kritis dengan tujuan utama terwujudnya generasi emas bangasa Indonesia. Munculnya Perpres tersebut tidak lain dengan tujuan mulia, yaitu demi terwujudnya bangsa Indonesia yang berkarakter.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi atau tulisan ilmiah yang diarahkan pada objek penelitian atau dengan mengumpulkan bahan tertulis, atau penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah pada hakekatnya berdasarkan analisis yang kritis dan mendalam berdasarkan bahan kepustakaan (Faiz et al., 2021; Muchtar & Suryani, 2019).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah peraturan presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan Pendidikan karakter. Sumber sekunder dalam

penelitian ini yaitu artikel ilmiah yang berasal dari jurnal nasional maupun internasional. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*). Peneliti mengkaji secara mendalam isi dari perpres no 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Sedangkan artikel ilmiah yang berasal dari jurnal peneliti gunakan untuk menggali makna yang terkandung pada perpres tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan penguatan pendidikan karakter

Penguatan pendidikan karakter (PPK) dinaungi oleh peraturan presiden No 87 tahun 2017. Kebijakan tersebut sebagai wujud usaha untuk melakukan revolusi mental para generasi bangsa. Program pemerintah tersebut menjadi program andalan terutama untuk mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Perpres tentang PPK tersebut terdiri dari enam bab dan 18 pasal. Bab 1 tentang ketentuan umum yang terdiri dari 5 pasal, bab 2 tentang penyelenggaraan PPK yang terdiri dari 6 pasal, bab 3 tentang pelaksana dan tanggung jawab yang terdiri dari 3 pasal, bab 4 tentang pendanaan yang terdiri dari 1 pasal, bab 5 tentang ketentuan peralihan yang terdiri dari 1 pasal dan bab 6 tentang penutup yang terdiri dari 1 pasal (Penguatan Pendidikan Karakter, 2017).

Dalam perpres No 87 tahun 2017 tersebut, PPK memiliki 3 tujuan yaitu *pertama,* membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. *Kedua,* mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan *ketiga,* merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. Tujuan PPK tersebut merupakan tujuan jangka panjang yang berkaitan dengan pembangunan sumbe daya manusia Indonesia dimulai dengan mempersiapkan generasi yang berkarakter. Generasi yang berkarakter merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan. Pendidikan menjadi alat yang paling efektif untuk mempersiapkan generasi yang berkatakter (Darman, 2017). Maka sangat tepat kebijakan ini dibuat oleh pemerintah guna mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter melalui pendidikan. Selain mempersiapkan generasi emas yang berkarakter, tujuan preventif juga perlu dilakukan. Usaha untuk membentengi generasi bangsa dari perilaku-

perilaku yang tidak berkarakter dan berlawanan dengan norma-norma yang berlaku sebagai dampak negatif dari globalisasi (Dalyono & Dwi Lestariningsih, 2017).

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter

Dalam kebijakan PPK penyelenggaraan PPK dilakukan pada satuan pendidikan formal, nonformal dan informal. Penyelenggaraan PPK pada jalur formal dilakukan secara integrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan formal sudah sangat detail dijelaskan pada kebijakan tersebut. Namun peyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan nonformal dan informal yang masih sangat terbatas.

Pendidikan karakter tidak bisa dilakukan dalam waktu sebentar atau dengan hitungan hari, namun memerlukan waktu dalam hitungan tahun. Penyelenggaraan pendidikan karakter telah dijelaskan pada Perpres no 87 tahun 2017 bab 1 pasal 4a yang isinya adalah sebagai berikut, bahwa penyelenggaraan PPK yang terdiri atas: 1. PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal; 2. PPK pada Nonformal; 3. PPK pada Informal (Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter).

Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimkasud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. sedangkan jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. (Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter). Atau dengan kata lain penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter dapat dilakukan di sekolah, keluarga dan masyarakat. Sebagaimana konsep tripusat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena yang berperan membentuk karater bukan hanya pendidikan formal, atau sekolah atau lingkungan masyarakat, bukan pula hanya keluarga, maka penyelenggaraanya pun tidak dapat secara terpisah, namun harus dilakukan secara bersama-sama.Tiga pusat pendidikan tersebut tidak dapat berjalan secara terpisah, melainakan harus saling terintegrasi satu sama lain. Berikut gambaran tentang tripusat pendidikan:
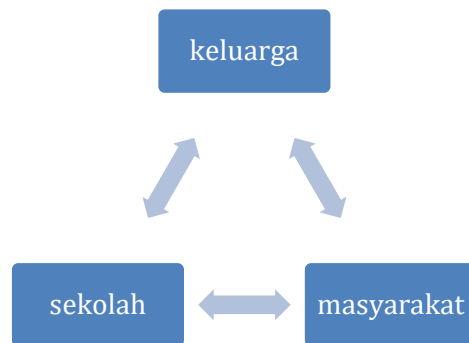
Gambar 1. konsep penyelengggaraan pendidikan karakter secara terintegrasi

Pendidikan keluarga

Keluarga memilki peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter. Karena keluarga adalah cerminan kepribadian dalam mendidik. Orang tua adalah guru dalam pendidikan karakter yang memunyai pengaruh sangat besar dan bertahan lama karena hubungan orang tua dan anak berlangsung sepanjang hayat, tidak dapat diputus oleh siapa pun atau dengan sebab apa pun (Harun, 2015b, p. 304). Keterlibatan keluarga dalam pendidikan karakter secara khusus telah dijabarkan dalam Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di bab 1 pasal 1 ayat 3 yang isinya adalah sebagai berikut :

Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.

Pendidikan karakter di keluarga dipengaruhi oleh tauladan dan kualitas pertemuan dengan keluarga. Saat ini di era globalisasai terdapat pergeseran budaya, dimana ayah dan ibu bekerja, sehingga intensitas pertemuan dengan keluarga sangat minim. Potret keluarga Indonesia saat ini mulai bergeser menjadi keluarga yang sibuk, dimana ayah dan ibu sibuk bekerja. Bentuk komunikasi dengan keluarga telah beralih ke HP, sehingga muncullah slogan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

Penanaman jam belajar masyarakat mulai dihimbau yaitu mulai jam 17.00 s.d pk 21.00 dimana orangtua diharapkan bersama anak-anak tanpa gangguan HP. Namun hal ini sangat sulit di terapkan karena HP sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok dan jam bekerja orangtua tidak semuanya ada pada jam tersebut. Perekonomian, dan kesadaran orang tua juga menjadi kendala.

Pendidikan karakter di Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang terdiri dari sekelompok orang dan sekelompok keluarga. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan berkontribusi terhadap budaya dalam masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat saat ini adalah cerminan dari keluarga yang ada di Indonesia. Masyarakat juga ikut berkontribusi dalam membentuk karakter manusia. Masyarakat yang berkarakter baik, akan dapat mempengaruhi masyarakat lain yang hidup bersama kelompoknya. Nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki kelompok masyarakat di Indonesia sudah merupakan miliki bangsa sebagai potensi yang tak ternilai harganya untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia (Ruyadi & Si, 2010). Nilai-nilai tersebut yang seharusnya di tanamkan pada setiap benak siswa.

Penanaman karakter pada maysarakat diperlukan suatu sistem yang secara langsung memberikan pendidikan kepada masyarakat itu sendiri. Penanaman tersebut hendaknya terrencana dengan matang. Seorang pemimpin kelompok masyarakat harus memiliki kesadaran akan potensi yang ada pada masyarakatnya. Potensi masyarkat tersebut dapat menjadi karakter bagi masyarakat itu sendiri. Maka diperlukan pola-pola strategis untuk menanmkan karakter pada masyarakat tertentu. Hal tersebut belum terperinci secara jelas di perpres 87tahun 2017 yang secara khusus sebagai dasar pelaksanaan penguatan pendidikan karakter.

Pendidikan karakter di Sekolah

Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan pada program intrakulikuler, kokulikurikuler dan ektrakurikuler. Hal ini dijelaskan di Peraturan presiden nomor 87 Pasal 6 ayat satu yang isinya sebagai berikut, bahwa penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur Pendidikan Formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: a. Intrakurikuler; b. Kokurikuler; dan c. Ekstrakurikuler.

Pelaksanaan pendidikan karakter melalui intrakurikuler adalah dengan mengembangkan sikap dan kebiasaan yang tidak ada di kurikulum, namun merupakan kurikulum tersembunyi atau *hidden* kurikulum. Menurut Anita Lie bahwa pendidikan karakter itu bukan merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri tetapi harus diintgrasikan dalam kurikulum, artinya menjadi penguatkurikulum yang sudah ada, yaitu dengan mengimplementasikan dalam mata pelajaran dan keseharian peserta didik. Keberhasilannya dapat dilihat melalui sikap keseharian (Judiani, 2010).

Selain melalui porgram intrakurikuler, Penanaman nilai-nilai karakter juga dilakukan melalui kokulikuler. Program kokurikuler yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler kegiatan

yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler (Perpres No. 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter). Artinya Pendidikan karakter tidak hanya pada saat proses pembelajaran, malainkan program pendidikan yang ada, salah satunya adalah program kokurikuler.

Selanjutnya, Pengembangan pendidikan karakter melalui ektrakurikuler kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.

Isu-isu kontempore pendidikan karakter

Menurut Licona pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti (Harun, 2011). Pengertian yang disampaikan Lickona di atas memperlihatkan adanya proses perkembangan yang melibatkan pengetahuan (moral knowing), perasaan (moral feeling), dan tindakan (moral action), sekaligus juga memberikan dasar yang kuat untuk membangun pendidikan karakter yang koheren dan komprehensif (Harun, 2011).

Pelaksanaan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan formal cenderung mudah untuk dilakukan. Hal tersebut dapat terjadi karena lingkungan pendidikan formal merupakan lingkungan pendidikan yang tersistematis. Baik dari segi sumberdaya manusia, materi, hingga pengembangan budaya dan ilkim yang terdapat pada lingkungan formal.

Hal tersebut berbeda ketika pelaksanaan pendidikan karakter di jenjang pendidikan non formal dan informal. Jenjang pendidikan tersebut belum memiliki landasan sistem yang kuat untuk melakasanakan pendidikan karakter. SDM, kurikulum, lingkungan keluarga, yang dimilik oleh jenjang pendidikan Non formal dan Informal belum cukup untuk melaksanakan Penguatan pendidikan karakter. Akibanya tripusat pendidikan tersebut masih berjalan masing-masing dan belum saling berintegrasi. Bahkan pendidikan nonformal pun hannya di anggap sebagai pendidikan yang hanya beorientasi kepada intelektual saja bukan pada perilaku atau karakter siswa.

Minimnya pengetahuan guru untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah juga menjadi faktor hambatan yang besar bagi lembaga pendidikan formal. Banyak guru yang masih bingung mengintegrasikan atau memasukan muatan karakter

pada proses pembelajaran yang guru ampu. Sehingga tidak sedikit pembelajaran kembali fokus pada materi, bukan pada perubahan perilaku peserta didik.

Penguatan karakter peserta didik

Penguatan pendidikan karakter memiliki landasan filosofis Filsafat perenialisme. Menurut pandangan Perenialisme, saat ini sedang terjadi krisis kebudayaan dalam kehidupan manusia modern. Untuk menghadapi situasi krisis itu, Perenialisme memberikan pemecahan dengan jalan "kembali kepada kebudayaan masa lampau", kebudayaan yang dianggap ideal.

Selain konsep tripusat pendidikan (sekolah keluarga dan masyarakat) Ki Hadjar Dewantara juga memiliki konsep tentang *tringgo (ngerti, ngroso, nglakoni)* (Wardani, 2010). Konsep ini merupakan esensi dari PPK bagi para pendidik di semua lingkungan pendidikan. Bukan hanya lama sekolah saja yang di ubah, namun esensi pelaksanaan juga harus difahami oleh semua pelaku pendidikan. Apakah lima hari sekolah mampu menjamin perubahan karakter pada diri peserrta didik, sehingga perpres tersebut memberikan pilihan untuk dapat melaksanakan 5 hari sekolah?
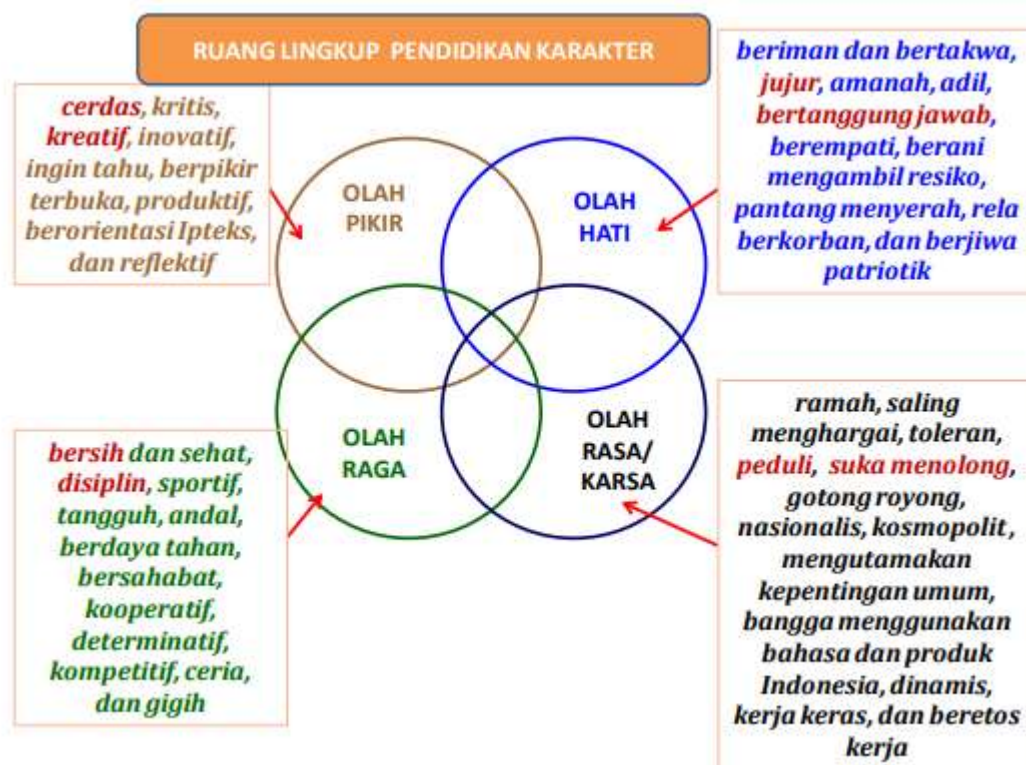
Gambar 2. Ruang Lingkup Pendidikan Karakter Kemendiknas

Berdasarkan gambar 2, pendidikan karakter dilakukan dengan memperhatikan empat aspek yang ada dalam diri manusia yaitu raga (jasmani), Pikir (pikiran), hati dan Rasa. 4 aspek tersebut yang sejatinya membentuk karakter individu. Maka, keempat aspek tersebut harus terlibat secara berkesinambungan dalam kegiatan pendidikan.

Tidak hanya menekankan pada pengetahuan yang hanya berbasis pikiran saja, namun hati dan rasa juga perlu mendapatkan perhatian yang besar. Penguatan pendidikan karakter harus dilakukan secara terintegrasi melalui 3 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat. Selain itu juga harus mempertimbangkan 4 komponen yang menjadi fokus utama dalam keberhasilan program PPK ini yaitu, raga, pikir, hati dan rasa.

Penyelenggaraan PPK Tidak cukup hanya dengan mengubah lama waktu sekolah, namun banyak hal yang harus terlibat dalam perbaikan karakter ini. Penguatan karakter bangsa merupakan masalah yang kompleks. Dalam interen sekolah pun banyak hal yang harus diperbaiki dan di ubah untuk melaksanakan peraturan ini. Kepemimpian sekolah, guru, kurikulum, budaya, iklim dan lain sebagainya juga harus dipersiapkan secara matang, sehingga penguatan karakter dapat terlaksana dengan baik. Sehingga implementasi peraturan ini bukanlah suatu yang mudah. Butuh banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan ini. Pihak sekolah sebagai pelaksana pun tidak serta merta langsung menerapkan kebijkan tersebut. Sekolah perlu melakukan kajian, perencanaan dan persiapan untuk melaksanakan kebijkan ini. Kepala sekolah beserta guru harus dapat mempertimbangkan hal-hal yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan tersebut. Guru mulai mengembangkan diri untuk dapat memberikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembanganan atau penguatan karakter peserta didik. Mula dari perencanaan pembelajaran, pemilihan strategi hingga pada taraf evaluasi.

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru adalah Konsep *tringo.* Konsep tersebut merupakan tahapan dalam proses penguatan pendidikan karakter peserta didik. Siswa terlebih dahulu diberi tahu (*ngerti*) tentang baik buruknya suatu karakter dan perilaku. Tidak cukup haya tahu saja, namu peserta didik juga dituntut harus pernah merasakannya (*ngroso*). Merasakan memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, sehingga ia akan tertanam lebih dalam di dalam benak mereka. Setelah mengetahui dan merasakan, peserta didik juga harus melakukan (*nglakoni*). Nglakoni juga memberikan penglaman bagi peserta didik untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari (Lestari YP & Putra, 2022).

KESIMPULAN

Penguatan pendidikan karakter tidak hanya semata-mata dilakukan di pendidikan formal saja, namun juga di lingkungan pendidikan keluarga dan masyarakat. Tidak hanya sekolah yang dituntut untuk merubah karakter siswa, tetapi keluarga dan masyarakat juga dituntut untuk membantu menanamkan pendidikan karakter. Integrasi pendidikan karakter antara pendidikan formal, pendidikan keluarga dan masyarakat menjadi dasar utama keberhasilan pelaksanaan penguatan pendidikan

karakter. Hanya saja, kebijakan penguatan pendidikan karakter masih cenderung mengatur secara spesifik pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di sekolah saja. Hal tersebut seolah-olah mengindikasikan bahwa beban penguatan pendidikan karakter hanya diberikan kepada sekolah atau lembaga formal saja. Padahal keluarga dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam penguatan pendidikan karakter.

Integrasi penguatan pendidikan karakter antara sekolah, keluarga dan masyarakat dapat menjadi strategi yang ampuh untuk menguatkan karakter peserta didik. Oleh karena itu, perlu disusun strategi yang matang untuk bisa mengintegrasikan tiga lingkungan pendidikan tersebut untuk bersama-sama menguatkan pendidikan karakter peserta didik, sehingga cita-cita dan harapan bangsa, memiliki peserta didik yang berkarakter baik dapat erwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Ajat Sudrajat. (2011). Mengapa pendidikan karakter? *Jurnal Pendidikan Karakter*, *1*(1), 47–58. https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1316/1094

Atika, N. T., Wakhuyudin, H., & Fajriyah, K. (2019). Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter membentuk karakter cinta tanah air. *Mimbar Ilmu*, *24*(1), 105–113. https://doi.org/10.23887/MI.V24I1.17467

Dalyono, B., & Dwi Lestariningsih, E. (2017). Implementasi penguatan pendidikan karakter di sekolah. *Bangun Rekaprima: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa, Sosial Dan Humaniora*, *3*(2), 33–42. https://jurnal.polines.ac.id/index.php/bangun_rekaprima/article/view/865

Darman, R. A. (2017). Mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 melalui pendidikan berkualitas. *Jurnal Edik Informatika: Penelitian Bidang Komputer Sains Dan Pendidikan Informatika*, *3*(2), 73–87. https://doi.org/10.22202/jei.2017.v3i2.1320

Faiz, A., Soleh, B., Kurniawaty, I., & Purwati, P. (2021). Tinjauan analisis kritis terhadap faktor penghambat pendidikan karakter di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, *5*(4), 1766–1777. https://doi.org/10.31004/BASICEDU.V5I4.1014

Fanny, A. M. (2020). SettingsSinergitas Tripusat Pendidikan pada program penguatan pendidikan karakter (PPK) di SD dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. *EduStream: Jurnal Pendidikan Dasar*, *4*(2), 176–183. https://doi.org/10.26740/EDS.V4N2.P176-183

Harun, C. Z. (2015a). Manajemen Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, *3*, 302–308. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Harun, C. Z. (2015b). Manajemen pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, *0*(3), 302–308. https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/2752/2284

Ismail, S., Suhana, S., & Zakiah, Q. Y. (2020). Analisis kebijakan penguatan pendidikan karakter dalam mewujudkan pelajar pancasila di sekolah. *Jurnal Manajemen*

Pendidikan Dan Ilmu Sosial, *2*(1), 76–84. https://doi.org/10.38035/JMPIS.V2I1.388

Judiani, S. (2010). *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum*. *16*(April), 280–289. https://media.neliti.com/media/publications/138571-ID-implementasi-pendidikan-karakter-di-seko.pdf

Lestari YP, L., & Putra, L. F. (2022). The Effect of Tax Knowledge, Application of E-Billing System and Understanding of The Tri Nga Teachings. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, *5*(2), 137–148. https://doi.org/10.26618/JRP.V5I2.9340.G5419

Muchtar, A. D., & Suryani, A. (2019). Pendidikan Karakter Menurut Kemendikbud. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *3*(2), 50–57. https://doi.org/10.33487/EDUMASPUL.V3I2.142

Presiden. (2017). *Perpres no 87 tahun 2017*.

Penguatan pendidikan karakter, (2017).

Ruyadi, Y., & Si, M. (2010). *Model pendidikan karakter bebasis budaya lokal (Penelitian terhadap Masyarakat Adat Kampung Benda Kerep Cirebon Provinsi Jawa Barat untuk Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah)*. 8–10.

Setiawan, F., Hutami, A. S., Riyadi, D. S., Arista, V. A., & Al Dani, Y. H. (2021). Kebijakan penguatan pendidikan karakter kelalui pendidikan Agama Islam. *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, *4*(1), 1–22. https://doi.org/10.23971/MDR.V4I1.2809

Suriadi, H. J., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). Analisis Problema Pembelajaran Daring Terhadap Pendidikan Karakter Peserta Didik. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, *3*(1), 165–173. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i1.251

Wardani, K. (2010). *Peran Guru Dalam Pendidikan Karakter Menurut Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara*. *November*, 8–10.

Wayan, I., Santika, E., Studi, P., Pancasila, P., & Kewarganegaraan, D. (2020). Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Daring. *Indonesian Values and Character Education Journal*, *3*(1), 8–19. https://doi.org/10.23887/IVCEJ.V3I1.27830